

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan rumusan masalah. Hal lain yang disampaikan di bab ini adalah tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab pendahuluan diakhiri dengan menguraikan struktur penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semua orang menginginkan pendidikan yang bagus. Institusi pendidikan dengan manajemen yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi komunitas sekolah. Empat langkah dapat diambil untuk membuat organisasi pendidikan menjadi lebih baik yaitu meyakinkan semua pemangku kepentingan, memberikan pelatihan untuk mendukung implementasi kualitas manajemen, menerapkan kebijakan yang menekankan kelompok dan manajemen puncak, dan menerima pengakuan dan penghargaan dari mereka yang telah mengerahkan upaya besar (Kemendikbud, 2014).

Upaya besar seperti komitmen manajemen puncak, kesopanan, dan tanggung jawab terhadap pelanggan adalah elemen penting dalam kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, manajemen pendidikan harus terus berinovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pembelajaran di institusi pendidikan (Topalović, 2015). Untuk memastikan hal ini terjadi dengan baik, lembaga pendidikan harus mempertimbangkan jenis penciptaan nilai: yang ekonomi dan non-ekonomi. Sayangnya, hal ini tidak mudah dilakukan, terutama karena pemangku kebijakan harus terlibat dengan berbagai cara dan berubah dari

waktu ke waktu untuk memastikan dan meningkatkan hal-hal dengan cara terbaik (Argandoña, 2011).

Selain itu, pemangku kebijakan sangat perlu terlibat dalam menciptakan rasio guru-murid yang lebih baik, strategi penyebaran yang efektif, kepemimpinan pendidikan yang inventif, dan praktik penilaian yang inovatif meskipun sangat bertanggung jawab atas orientasi. (Garira, 2020). Untuk menjamin hal ini, penyelenggaraan akuntabilitas lembaga pendidikan dianggap dapat membantu.

Untuk memenuhi hal ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang memungkinkan kolaborasi pendidikan dari luar Indonesia untuk ikut menyelenggarakan pendidikan nasional di seluruh wilayah negeri. Perwakilan negara atau lembaga pendidikan internasional dapat terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, seperti tertuang pada Pasal 64 Undang-Undang Sisdiknas. Sebagai turunan peraturannya terdapat Permendikbud No. 31 tahun 2014 yang mengatur kerja sama antara lembaga pendidikan asing (LPA) dan lembaga pendidikan Indonesia (LPI) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019). Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan sekolah dalam konteks lembaga pendidikan dari institusi asing. Peraturan di atas diikuti dengan peraturan yang lebih teknis yakni Peraturan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud No. 407/D/PP/2015 tentang Juknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dikdasmen oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) yang disebut dengan Satuan Pendidikan Kerjasama (Kemendikbud, 2017).



Gambar 1. Skema Penyelenggaraan SPK di Indonesia

Sumber: UU Sisdiknas PP 17/ 2010

Satuan pendidikan kerja sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola oleh lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekolah SPK adalah sekolah yang menggunakan kurikulum asing, dipadukan dengan kurikulum nasional dan menerima akreditasi. Jumlah lembaga pendidikan dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) terus meningkat di Indonesia sejak Desember 2014. Berdasarkan data tahun 2023, data sekolah SPK di Indonesia adalah sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------|---|---------------|
|  | Yayasan 264 |  | Satuan Pendidikan 509 |  | LPA 43 |
|  | Rombel 4.736 |  | Peserta Didik 98.625 |  | GTK 16.026 |

Gambar 2. Data Satuan Pendidikan SPK di Indonesia

Sumber: www.dikdasmn.kemdikbud.go.id

Perbandingan data sekolah nasional dengan sekolah SPK di daerah Jabodetabek adalah seperti berikut:

Tabel 1. Data Satuan Pendidikan SPK di Jabodetabek

| Jenjang | Sekolah Nasional | SPK |
|---------|------------------|-----|
| SD | 6.739 | 82 |
| SMP | 2.831 | 75 |
| SMA | 1.177 | 57 |
| Jumlah | 10.747 | 214 |

Sumber: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>

Sekolah SPK menggunakan kurikulum berbasis internasional seperti Cambridge yang berasal dari Inggris; kurikulum berbasis penyelidikan seperti International Baccalaureate yang berbasis di Genewa, Swiss; atau kurikulum Advanced Program (AP) yang berasal dari Amerika, kurikulum negara asing seperti New Zealand, Australia, Taiwan, dan lainnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019). Terlepas dari afiliasinya atau negara asal mereka, sekolah SPK bertujuan untuk memiliki standar khusus berkualitas tinggi melalui kegiatan penyelenggaraan berbasis kurikulum internasional ini (Asia, 2010).

Sejalan dengan gagasan ini, lembaga pendidikan SPK percaya bahwa akreditasi internasional adalah cara untuk mendapat pengakuan sebagai lembaga

pendidikan internasional dan untuk diketahui oleh lembaga pendidikan luar negeri. Selain itu, lembaga pendidikan SPK melihat akreditasi internasional sebagai cara untuk mengukur standar global dan memperoleh reputasi global. Akreditasi sekolah internasional bertujuan untuk memperluas kerangka akreditasi dengan memasukkan evaluasi internal dan eksternal (Fertig, 2007)

Walaupun pemerintah sekarang mengatakan akreditasi nasional sangat penting, penilaian kualitas berkala yang dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional tampaknya belum menyentuh masalah kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah SPK. Kualitas pemangku kepentingan lembaga pendidikan termasuk pentingnya lingkungan kampus yang baik dan kemampuan pemangku kepentingan untuk menunjukkan kualitas pendidikan tinggi (Simangunsong, 2019). Komunitas sekolah sebagai bagian layanan pendidikan belum terlibat dalam kualitas mutu pendidikan yang akan dipilih untuk anak-anak mereka.

Selain itu, ada institusi pendidikan yang tidak percaya pada kualitas penjaminan yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional, meskipun ada yang percaya bahwa hasil akreditasi sekolah mempengaruhi preferensi siswa (Jacqmin & Lefebvre, 2021). Sekolah masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi sendiri, yang merupakan akibat dari ketidakmampuan sekolah untuk menyediakan sarana yang diperlukan untuk akreditasi nasional (Asia, 2010). Selain itu, akreditasi nasional dianggap tidak cukup kuat untuk mempengaruhi perubahan jika tidak ada inisiatif dan semangat untuk mengubah institusi pendidikan (Cooper et al., 2014).

Akreditasi internasional seperti Asosiasi Sekolah Kristen Internasional (*Association Christian Schools Internasional/ACSI*) dan Asosiasi Sekolah dan Pendidikan Barat (*Western Association Schools and Colleges/WASC*) telah menjadi pilihan yang diminati oleh banyak lembaga pendidikan di luar negeri, dan saat ini mulai dilirik oleh lembaga pendidikan di Indonesia (Colleges, 2012). Penyelenggaraan standar akuntabilitas pada institusi pendidikan baik dengan akreditasi internasional dinilai menjawab kebutuhan penilaian kualitas pendidikan. Dampak akreditasi internasional secara khusus dalam jangka panjang membantu meningkatkan informasi yang tersedia bagi siswa dan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas untuk perbaikan terus menerus prosedur (Jacqmin & Lefebvre, 2021). Akreditasi internasional juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan nilai akademik siswa (Dill et al., 1996)

Permasalahan signifikan yang dihadapi adalah proses akreditasi sangat beragam, dan pengisian formulir akreditasi tidak sesuai dengan konteks penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggara sekolah nasional belum melakukan embuat evaluasi diri sekolah (Asia, 2010). Oleh karena itu, sekolah-sekolah SPK yang harus mengikuti akreditasi nasional menemukan bahwa akreditasi menjadi tidak penting, tidak mencapai hasil yang diinginkan, dan tidak mampu mencapai harapan pembelajaran (Thimpson & Bayerlein, 2021). Bahkan sebagian besar lembaga pendidikan nasional merasa bahwa akreditasi hanyalah proses centang kotak (Zulkifli et al., 2015)

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai institusi pendidikan bertaraf internasional, institusi SPK harus memenuhi standar akuntabilitas internasional dari

negara asal atau afiliasi mereka, Pengakuan akreditasi internasional sangat penting bagi semua pemangku kepentingan karena merupakan indikator kualitas (quality indicator), peningkatan kualitas berkelanjutan (quality improvement), dan referensi pengambilan keputusan (decision making reference) untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tetap memenuhi standar kualitas internasional..

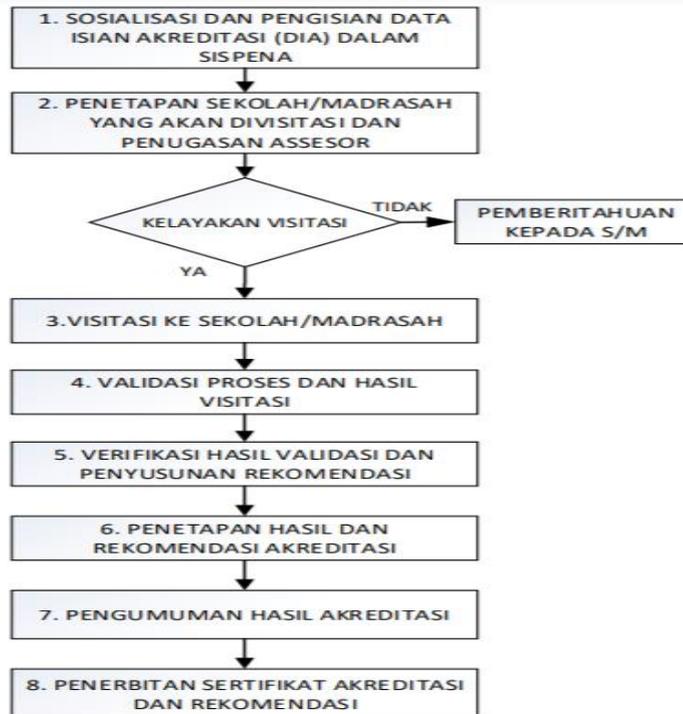
Permasalahan timbul karena sekolah SPK memerlukan akreditasi nasional walaupun telah mengikuti akreditasi internasional (Ditjen Paudikdasmen, 2020). Ini menimbulkan problematika. Selain monitoring dan evaluasi, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, ini dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu pengawasan mutlak yang diberlakukan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Propinsi memiliki otoritas langsung untuk melakukan hal ini. Cakupan pengawasan berfokus pada pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan pendidikan. Selama bertahun-tahun, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Pemantauan dan evaluasi melibatkan peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian, pengelolaan, dan pembiayaan. (Toharudin, 2022).

Kegiatan akreditasi pendidikan secara umum adalah fundamental dan diperlukan walaupun belum sesuai dengan makna pelaksanaannya (Dassa et al., 2017). Terlebih tentang akreditasi nasional dengan instrumen akreditasi BAN S/M belum dapat dilengkapi dengan mudah oleh satuan pendidikan Untuk sebagian besar sekolah SPK, proses akreditasi nasional hanya bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana sekolah telah memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan, walaupun penyelenggaraan sekolah SPK telah melampaui standar nasional.

Pada kenyataannya, akreditasi nasional sebagai standar minimum kualitas membuat guru dan tenaga administrasi pendidikan menjadi lebih stres (Ibrahim, 2014). Belum lagi jika proses ikut serta dalam akreditasi semata-mata merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan akuntabilitas publik, yang tidak sesuai dengan keyakinan institusi pendidikan (BAN PAUD PNF Propinsi, 2016). Instrumen akreditasi nasional yang dimaksudkan oleh BAN S/M mewajibkan sekolah SPK memenuhi standar nasional dengan delapan indikator standar nasional pendidikan. Sejak 2019, BAN S/M telah menetapkan instrumen khusus untuk mengakreditasi sekolah SPK di Indonesia (Ditjen Paudikdasmen, 2020).

Sekolah SPK menghadapi kesulitan tersendiri dengan ketentuan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat akreditasi yang digunakan oleh sekolah SPK adalah perangkat akreditasi khusus untuk satuan pendidikan kerja sama dengan alur mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama (IASPK) untuk sekolah SPK di jenjang SD, SMP, dan SMA (Toharudin, 2022). Adapun alur mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme pelaksanaan akreditasi SPK di Indonesia

Sumber: Panduan Akreditasi BAN S/M (2020)

Sekolah-sekolah SPK menyadari bahwa proses akuntabilitas pelayanan pendidikan menjadi topik yang kontroversial saat mempertimbangkan model akreditasi internasional dan nasional. Hal ini disebabkan oleh dua kepentingan akreditasi yang ada tetapi beberapa standar akreditasi internasional dapat digunakan kembali saat akreditasi nasional diberlakukan (Legowo et al., 2020). Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan strategi mengintegrasikan kedua instrumen akreditasi yang berkaitan dengan penjaminan mutu sekolah SPK. Implementasi sistematis dan menyeluruh dari model sistem penjaminan mutu berbasis integrasi mungkin merupakan solusi yang tepat (Broto Legowo & Indiarso, 2017).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian menyeluruh atas komitmen program studi terhadap kualitas dan kemampuan penyelenggaraan program. Akreditasi secara formal menunjukkan bahwa program memenuhi atau melampaui persyaratan dan standar kualitas pendidikan (Broto Legowo & Indiarto, 2017). Selain memastikan kualitas di lembaga pendidikan, akreditasi juga dapat memberikan kepercayaan publik atau kepercayaan dan akuntabilitas (Awaludin, 2017). Walaupun demikian, akreditasi bukan semata-mata evaluasi, tetapi juga merupakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Akreditasi mengukur timbal balik pengakuan kualitas, kualifikasi sekolah dan ditunjukkan dengan peringkat akreditasi. (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2020). Dengan menyatukan para praktisi, guru, dan siswa dalam kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan persiapan profesional dan praktik profesional, akreditasi membantu kesatuan lembaga pendidikan.

Penelitian sehubungan dengan proses pelaksanaan akreditasi sekolah SPK yang relevan, yang harus memenuhi syarat terakreditasi internasional belum dilakukan. Akuntabilitas dan perubahan yang tidak konsisten sering menjadi pendorong standar akreditasi. Perumusan kebijakan dan undang-undang baru, standar sistem pendidikan sekolah SPK perlu dievaluasi dan didesain secara khusus sesuai karakteristik sekolah SPK. Perlu ada evaluasi apakah instrument akreditasi nasional benar-benar mendukung kemajuan kinerja sekolah SPK.

Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mendapatkan konsep akreditasi terpadu pada pelaksanaan akreditasi Sekolah

Satuan Pendidikan Kerjasama untuk memahami alasan dan dasar pemikiran bahwa sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) harus terakreditasi internasional untuk mendapatkan akreditasi, untuk menganalisis peran pemangku kebijakan dalam menjalankan akreditasi SPK sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, serta untuk memberi masukan model akreditasi terpadu antara akreditasi nasional dan akreditasi internasional khusus untuk sekolah SPK.

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas serta keterbatasan waktu dan tenaga, peneliti melakukan studi multi kasus tentang pelaksanaan akreditasi sekolah SPK yang melakukan akreditasi ACSI, berkurikulum International Baccalaureate (IB) dan Cambridge di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan pulau Jawa. Fokus penelitian adalah bagaimana menyusun penjaminan mutu SPK dengan menggunakan model akreditasi terpadu yang sederhana dan terintegrasi. Secara rinci masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah menentukan konsep akreditasi terpadu di Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama?
2. Bagaimana peran pemangku kebijakan dalam proses akreditasi Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama?
3. Bagaimana mengidentifikasi dan mengintegrasikan akreditasi BAN S/M dan akreditasi internasional menjadi model akreditasi terpadu (*simplified dan unified*) untuk Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama?

1.3 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian tentang akreditasi sekolah telah dipublikasikan, adalah seperti berikut:

| No | Peneliti | Judul | Kesimpulan dan Kesenjangan Penelitian |
|----|---|--|--|
| 1 | Lori Dassa, Barbara Ridener, Greg Sampson – Sage Publication, 2017. | An Overview of Topics on Accreditation: A Beginning | Akreditasi adalah kegiatan yang mempengaruhi kualitas akademis. Akredirasi nasional masih diperlukan walaupun sering kurang sesuai makna. (Dassa et al., 2017) |
| 2 | Arif Rahman Hakim, Nugraha Suharto – ASSEHR, 2018 | <i>The Role of Accreditation in Improving Education Quality</i> | Akreditasi sekolah berperan penting dalam memajukan mutu pendidikan. Keterlibatan pemangku kebijakan dan adanya suatu instrumen yang mudah dipahami baik oleh asesor maupun satuan Pendidikan pada saat pelaksanaan akreditasi. (A. R. Hakim & Suharto, n.d.) |
| 3 | Emilia Nur Chasanah, Sholihin Ibrahim Bafadal, Asep Sunandar – JAMP, 2018 | Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah | Pelaksanaan akreditasi perlu melibatkan pemangku kebijakan dalam pelaksanaannya, dan mengembangkan hal yang berhubungan dengan persiapan akreditasi agar lebih maksimal. (Sholihin et al., 2018). |
| 4 | Marjuki, Djemari Mardapi, Badrun Kartowagiran – JPEP, 2018 | Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) | Pelaksanaan akreditasi SMA/MA perlu memanfaatkan pengembangan instrumen akreditasi yang efektif, efisien, serta akuntabel dengan bentuk instrumen sederhana/praktis, berisi petunjuk teknis pengisian instrumen jelas dan mudah dipahami, serta menjaring data secara akurat, bukti pendukung data terukur. (Marjuki et al., 2018) |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | Sugiyanta, Soenarto – ReID, 2016 | <i>An Evaluation Model of Educational Quality Assurance Junior High Schools</i> | Pelaksanaan penjaminan mutu sekolah perlu mengembangkan model evaluasi organisasi yang menekankan proses evaluasi diri serta melibatkan pemangku kebijakan secara holistik (Sugiyanta, 2016). |
| 6 | Michael Fertig - SagePub, 2007 | <i>International school accreditation: Between a rock and a hard place?</i> | Kinerja akreditasi sekolah internasional berupaya menempatkan sekolah dalam kerangka akreditasi yang lebih luas, mencakup evaluasi internal dan eksternal. Penggunaan indikator instrumen yang generik berpotensi menyebabkan kinerja sekolah berkurikulum internasional menjadi kurang beragam dan lebih homogen.(Fertig, 2007) |
| 7 | Mercurius Broto Legowo, Budi Indiarto dan Deden Prayitno – IJQR, 2019 | Model Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Integrasi Standar Akreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008 | Sistem penjaminan mutu satuan pendidikan yang memiliki lebih dari satu badan standar mutu perlu diintegrasikan agar menjadi efisien dan efektif. (Legowo et al., 2020), |

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun beberapa penelitian telah dilakukan tentang proses akreditasi lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, belum ada penelitian yang mempelajari akreditasi sekolah SPK berkurikulum internasional atau sekolah yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi pendidikan internasional di Indonesia. Walaupun ada beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik akreditasi, temuan saat ini lebih berfokus pada dampak penelitian terhadap hasil pembelajaran daripada proses akreditasi. Oleh karena itu, topik penelitian yang dilakukan peneliti ini benar-benar baru dan memiliki manfaat bagi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah satuan

pendidikan kerjasama (SPK) sebagai unit penelitian. Dengan demikian, topik penelitian telah memiliki *state of art*.

1.4 Urgensi Penelitian

Pelaksanaan akreditasi di suatu lembaga pendidikan sangatlah penting. Akreditasi penting bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal itu karena hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu dan referensi dalam mengambil keputusan termasuk usaha peningkatan mutu (*quality improvement*) di masa mendatang baik bagi institusi itu sendiri maupun bagi pendidikan secara umum (Dassa et al., 2017).

Penyelenggaraan pendidikan sekolah SPK di Indonesia memerlukan standar tinggi untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Penyelenggaraan akreditasi pendidikan sekolah SPK memerlukan standar ukur pelaksanaan akreditasi yang sangat baik demi memastikan satuan pendidikan memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan, dan memenuhi standar kurikulum internasional yang diacunya.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan mutu berkelanjutan dan kesempatan untuk terlibat dengan badan akreditasi untuk lebih mendukung penyertaan keterlibatan pemangku kepentingan dan isu-isu yang terkait dalam proses sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan untuk memberi jawaban bagaimana penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia yang berhubungan dengan sekolah SPK agar dapat diperoleh kualitas pendidikan yang

berkualitas dunia dan menjadi kebaikan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses pelaksanaan akreditasi pendidikan sekolah SPK yang berada di wilayah Jakarta dan area Jawa. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal:

1. Mengeksplorasi konsep peningkatan kualitas yang dihasilkan dari proses akreditasi lembaga internasional bagi sekolah-sekolah satuan pendidikan kerjasama.
2. Menganalisis peranan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah satuan pendidikan kerjasama dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan.
3. Mengembangkan kebijakan akreditasi yang membantu membawa perubahan organisasi di badan akreditasi nasional (BAN S/M) dengan mempromosikan pembelajaran organisasi dan inisiatif peningkatan kualitas penjaminan mutu sekolah melalui standar akreditasi terpadu bagi sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).

Penelitian ini juga bertujuan memberi masukan kebijakan terhadap proses pelaksanaan penjaminan mutu atau akreditasi sekolah SPK dan memberi masukan kebijakan dan kesempatan terlibat dengan badan akreditasi nasional sehingga lebih

mendukung keterlibatan pemangku kepentingan. Selain itu, kiranya isu-isu yang terkait dalam proses akreditasi tidak tumpang tindih antara satu instrumen akreditasi dengan yang lainnya, termasuk bagaimana hasil dari proses penjaminan mutu tersebut benar dapat dilaksanakan untuk pengembangan sekolah secara umum dan khusus di masa mendatang dengan kualitas internasional. Hasil penelitian yang muncul dapat memberi masukan strategi menyusun sistem instrument dan proses akreditasi ideal bagi sekolah SPK sehingga lebih efektif dan menjawab tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah SPK yang menggunakan kurikulum internasional di Indonesia.

